BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa tersebut. Untuk memajukan pembangunan bangsa maka sektor pendidikan harus menjadi andalan, demikian pula untuk memajukan pendidikan maka proses pembangunan harus dipercepat. Hal ini dapat terlihat dari hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia di arahkan untuk pertumbuhan sektor ekonomi, sehingga semua kegiatan pembangunan ditujukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pada saat sekarang sektor pertanian masih menjadi andalan untuk mencapai kemajuan ekonomi, namun sektor pertanian tersebut harus di dukung oleh sektor industri yang tangguh.

Hubungan yang kuat antara pendidikan dan pembangunan industri sudah disadari oleh berbagai fihak, hal ini seperti dicontohkan oleh pengalaman-pengalaman negara lain yang sedang dalam proses pembangunan. Laporan Bank dunia pada tahun 1991 (World Development Report 1991 dalam Wardiman Djojonegoro., 1992:2) menyatakan bahwa kuatnya hubungan antara penyempurnaan pendidikan dan peningkatan produktivitas industri. Pendidikan akan mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa saluran. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan para pelaksana pembangunan yang relatif dapat dengan cepat melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan perkembangan ilmu dan teknologi yang dinamis dan pesat sekarang ini, dan dilakukan oleh para pelaksana pembangunan yang mempunyai taraf

pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksana pembangunan yang mempunyai taraf pendidikan yang lebih rendah.

1. Ciri-Ciri Masa Informasi

Masa informasi sebagai gelombang ketiga dari babakan peradaban manusia ditandai dengan hal yang sangat penting yaitu diantaranya dengan adanya pergeseran kekuasan dari kekuasan yang didasarkan pada kekuatan politik terhadap kekuatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Alvin Tofler, 1990).

Kemajuan di bidang informasi, komunikasi dan transportasi sangat mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Karena jarak bukan menjadi kendala, sistem perdagangan menjurus kepada persaingan dimana produk dipasarkan tidak hanya di suatu negara saja akan tetapi dapat keseluruh penjuru dunia (AFTA dan NAFTA serta APEC).

Perubahan-perubahan mendasar yang akan berlangsung pada masa depan terjadi karena kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, tenaga kerja dan kependudukan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada masa depan dalam bidang ekonomi diperkirakan akan terjadi suatu pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Dalam bidang tenaga kerja akan terjadi perubahan komposisi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan sektor industri. Perubahan dalam kependudukan akan menambah permintaan pada perumahan, transportasi dan kebutuhan infra struktur lainnya. Perubahan pada ilmu dan teknologi akan berpengaruh terhadap sikap dan pola hidup. Perubahan-perubahan ini sudah barang tentu harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan pada masa sekarang, karena pendidikan tidak lain adalah kegiatan sekarang untuk mempersiapkan dan menyongsong masa depan.

Peranan sektor industri ini akan semakin meningkat sehingga akan menggeser peranan sektor pertanian. Pergeseran peranan ini diperkirakan akan terjadi pada

pertengahan Repelita VII, tahun 1998/9 - 2003/4 (Boediono, 1990;2).

Pergeseran andalan pembangunan dari sektor pertanian ke sektor industri sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap komposisi tenaga kerja yang berkerja di sektor pertanian dan sektor industri baik dalam jumlah, jenis dan tingkat pendidikan yang diperlukannya. Kesempatan kerja pada sektor pertanian akan berkurang dan si satu fihak kelebihan tenaga kerja, sedangkan kesempatan pada sektor industri semakin bertambah dan dihadapkan pada kekurangan tenaga kerja.

Industrialisasi menimbulkan tantangan terhadap dunia kerja, tantangan itu perlu dihadapi bukan hanya dengan pengembangan kompetensi yang lebih tinggi dan spesifik, tetapi juga perlu dihadapi dengan sikap dan ethos kerja dan belajar yang tepat. Hal ini diperlukan, karena industrialisasi bagi Indonesia juga peralihan kultural dari budaya pertanian menjadi budaya industrial. Disini terlihat bahwa pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam menghadapi pergeseran struktur dan perubahan nilai dalam masyarakat.

Dari segi tenaga kerja, industrialisasi berarti penciptaan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa, berarti pula penciptaan tenaga kerja di bidang industri dan jasa. Dalam hal ini tenaga kerja dari sektor tradisional, misalnya sektor pertanian pindah ke sektor industri.

2. Pengaruh Era Persaingan

Pergeseran dari "*comparative advantage*" ke arah "*competitive advantage*" (Alvin dan Heidy Tofler, 1990), merupakan pengaruh nyata dari era persaingan. Untuk dapat diterima dalam kompetisi pasar ekspor, efisiensi industri merupakan hal yang mutlak, dan pada gilirannya industri dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Dalam masa perubahan struktur ekonomi ini akan terjadi suatu transisi nilai,

dan dalam masa itu akan berlangsung suatu proses transisi yang dapat menimbulkan suatu "anomi" atau sebaliknya yaitu "heteronomi" (Boediono, 1990; 3).

Dalam era persaingan tidak hanya berada pada sektor biaya tetapi yang paling penting pada kualitas produk. Dampak persaingan akan terasa pada kemajuan iptek yang secara langsung akan berpengaruh terhadap jenis, jumlah dan kebiasaan, dan sikap dalam bekerja. Sehingga pada gilirannya nanti dunia kerja di Indonesia akan semakin akrab dan lebih memahami makna teknologi.

Sifat-sifat teknologi yang harus diwaspadai dan berpengaruh terhadap kerja seperti ; a. perkembangan teknologi yang sering kali terjadi dengan lompatan-lompatan, sehingga pola kerja berubah secara diskontinyu, b. usia teknologi yang semakin pendek, c. teknologi industri hilir menjadi semakin murah, dan teknologi industri hulu cenderung menjadi makin sarat teknologi canggih yang mahal, d. Kecenderungan pemanfaatan teknologi untuk mulai menggantikan keterampilan manual manusia dan, e. kecenderungan teknologi menjadi semakin canggih. Perubahan dan perkembangan teknologi membawa dampak yang nyata pada kehidupan bisnis, dunia kerja maupun kehidupan sosial.

Indonesia yang tidak hanya kaya dengan sumber daya alam namun dikarunia pula dengan kekayaan sumber daya manusia, senantiasa diharapkan sumber daya manusia yang melimpah ini menjadi modal pembangunan dan bukan sebaliknya. Sebagai upaya menjadikan sumber daya manusia yang melimpah sebagai modal pembangunan adalah dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.

Jumlah tenaga kerja di Indonesia pada akhir tahun 1980-an dilihat dari latar belakang pendidikan memperlihatkan suatu kurva yang masih menceng kekiri. Dengan kata lain jumlah tenaga kerja lulusan sekolah dasar (88,20 %) merupakan yang terbesar

sedangkan tenaga kerja lulusan sekolah menengah baru sampai 11% dan tenaga kerja dengan latar belakang lulusan pendidikan tinggi baru 0,8% Sedangkan dilihat dari penempatan pencari kerja lulusan SD baru 38,25%, tamatan SMTP 22,08%, SMTA 15,6%, Sarjana Muda 21,17% dan Sarjana 22,72% (Engkoswara,1984;7).

Struktur tenaga kerja menurut pendidikan di Indonesia pada akhir tahun 1980-an menunjukkan bahwa yang tidak bersekolah sebesar 53%, berpedidikan dasar 34%, berpendidikan menengah 11% dan mereka yang berpendidikan universiter 2% (Boediono, 1990; 4).

Upaya untuk mengejar peningkatan pembangunan pada era industri idealnya komposisi tenaga kerja berlatar belakang pendidikan menengah yang paling dominan.

Pembaharuan pendidikan di Indonesia selama dua puluh lima tahun terkahir sangat menakjubkan dalam upaya menjawab tantangan di atas. Pada awal tahun 1960-an hanya 12% dari kelompok umur yang relevan terdaftar di pendidikan menengah dan kurang dari 1% terdaftar pada beberapa bentuk pendidikan yang lebih tinggi (Engkoswara, 1987).

Pembangunan pendidikan pada tahap-tahap awal tujuannya memang belum pernah dikaitkan dengan dunia kerja. Pendidikan pada waktu itu lebih ditekankan pada pemeliharaan, pemberian latihan dan pengajaran akhlak dan kecerdasan. Pendidikan diartikan sebagai transformasi kebudayaan. Keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja untuk mengisi berbagai sektor pembangunan akan jelas terlihat pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi (M.Fakry Gaffar, 1987 : 2).

Permasalahan keterkaitan antara pendidikan dan ketenaga kerjaan timbul kemudian pada saat kemajuan semakin meningkat, sehingga diperlukan tenaga-tenaga terampil untuk pelaksana pembangunan suatu negara. Dalam kaitan ini pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi.

Pada tahap selanjutnya, permasalahan keterkaitan antara pendidikan dengan ketenaga kerjaan semakin muncul kepermukaan. Pernyataan-pernyataan yang sering muncul baik itu hasil penelitian maupun pendapat masyarakat umum menyatakan bahwa belum terdapat kesesuaian antara pendidikan dan ketenaga kerjaan.

Salah satu upaya perpaduan yang sederhana antara sistem pendidikan dan sistem industri dihubungkan dengan "pasar tenaga kerja" yang berfungsi sebagai batas antara kedua sistem ini (Wardiman Djoyonegoro, 1992 : 4).

Pada gambar 1-I. menunjukkan keadaan yang umum, tetapi pertemuan antara kedua sistem itu adalah titik yang penting.

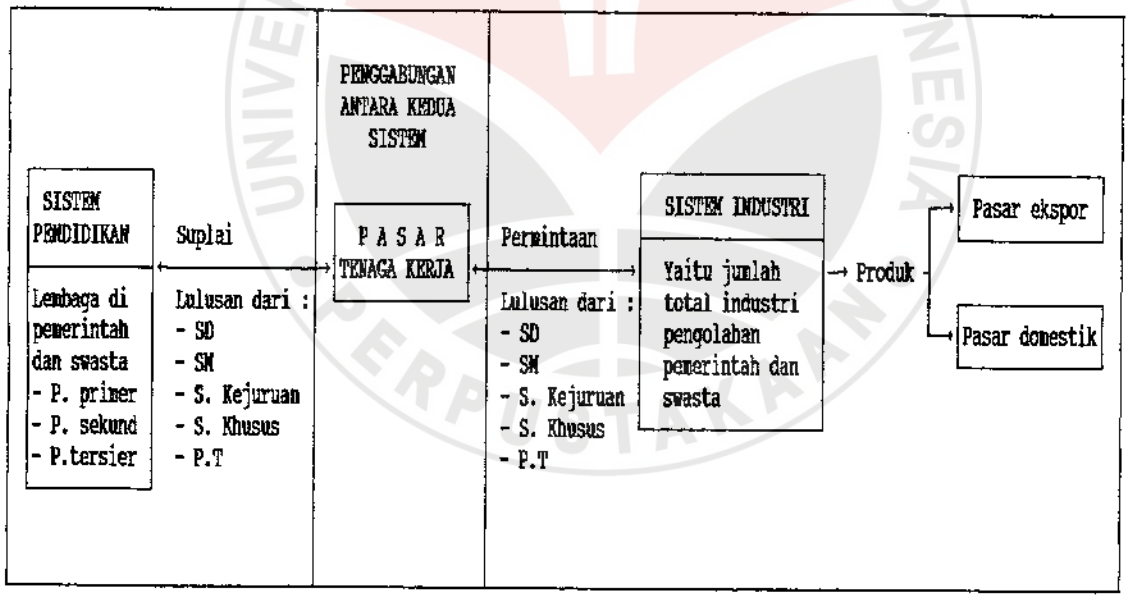

Gambar 1-I. Gabungan Sistem Pendidikan dan Dunia Kerja.

Keterangan : P = Pendidikan, S = Sekolah, SD = Sekolah Dasar
SM = Sekolah Menengah, P.T = Perguruan Tinggi
Sumber : Wardiman Djojonegoro, 1992:4.

Kedua sistem ini mempunyai permasalahan yang sendiri-sendiri. Namun yang penting adalah bagaimana persyaratan-persyaratan yang dapat dilakukan oleh suatu sistem pendidikan untuk mempercepat perkembangan sistem industri. Sebaliknya, dapat apakah sistem industri dapat lebih tegas menunjukkan persyaratan kualitas dan kuantitas yang lebih rinci tentang tenaga kerja manusia yang diperlukan olehnya, agar dapat maju dan berhasil di dalam era persaingan sekarang ini.

Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut, seperti ; orientasi dan persepsi masyrakat akan pekerjaan, keterbatasan pekerjaan di sektor formal, khususnya ketidak sesuai antara pengetahuan dan keterampilan yang dibekali dari lembaga pendidikan dengan persyaratan lowongan kerja yang tersedia dan sistem imbalan yang belum baik.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan pendidikan selama ini sesungguh-nya telah berkembang pesat, namun permintaan pembukaan lapangan kerja akibat pergeseran pola pembangunan telah meningkat secara lebih pesat. Dengan kondisi yang selalu dalam ketertinggalan,maka mau tidak mau pembangunan pendidikan harus lebih memperhatikan dan terpusat kepada penyesuaian diri dengan kebutuhan permintaan pembukaan lapangan kerja.

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan sektor pendidikan yang menekankan kepada penyesuaian pemenuhan kebutuhan dunia kerja adalah pertama bagaimana meningkatkan keterampilan persediaan lulusan yang belum bekerja dan kedua, bagaimana menyiapkan lulusan lulusan yang akan datang agar dapat memenuhi kebutuhan permintaan pembukaan lapangan kerja.

Kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana menyiapkan lulusan dari suatu lembaga pendidikan dapat memenuhi tuntutan dari dunia kerja kelak.

Jenis pendidikan dan jenjang pendidikan yang dijadikan perioritas dalam upaya menyiapkan dan memenuhi permintaan pembukaan lapangan kerja pada era industri, menurut hemat peneliti dan sekaligus merupakan kajian penelitian adalah jenis pendidikan kejuruan pada jenjang menengah. Hal ini dengan alasan bahwa pola proporsi tenaga kerja pada negara yang sedang melakukan industrialisasi lebih mengutamakan tenaga kerja yang berpendidikan menengah. Boediono (1990;6), memperkirakan pada akhir Pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua, tenaga kerja yang berpendidikan menengah dapat ditingkatkan menjadi sebesar 52% dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi 7%.

3. Pendidikan Kejuruan dalam Pembangunan Bangsa

Pendidikan dan latihan kejuruan telah merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan dan latihan di berbagai negara. Meskipun dalam pelaksanaannya di antara negara-negara tersebut terdapat perbedaan yang mendasar mengenai fungsi dan peranan pendidikan kejuruan. Dalam buku yang berjudul, "Made in America" diperlihatkan bagaimana alur dari sekolah sampai mendapat pekerjaan pada kelompok negara yang berlainan. Suatu kelompok negara disebut dengan negara type A, termasuk Amerika, Swedia, Inggris. Lembaga pendidikan formal menyediakan sebagian besar keterampilan profesional yang diperlukan di tempat kerja, dan latihan *on-the-job* menyediakan sekedar instruksi atau petunjuk-petunjuk cepat yang berhubungan dengan pekerjaan yang dihadapinya. Melihat keadaaan sekarang ini maka sistem di Indonesia dapat juga di sebut negara tipe-A. Sebaliknya ada sekelompok negara lain, seperti Jepang dan Jerman dengan "sistem gandanya", dimana latihan *on-the-job* sangat ditekankan, contohnya masa belajar di pabrik dilakukan bertahun-tahun, dalam rangka mengembangkan keterampilan baik umum ataupun khusus, kelompok negara-negara ini disebut negara tipe-B.

Di dalam dua tipe negara tersebut, pola khusus pendidikan berbeda jauh. Di Jerman para pemuda bergerak dari sekolah ke pekerjaan melalui jalur pendidikan khusus. Dalam hal ini pendidikan dan latihan kejuruan merupakan kerjasama yang erat yang diatur melalui undang-undang, antara sebagian besar perusahaan milik pemerintah dan swasta. Di Jepang sebaliknya sesudah latihan formal, pendidikan dan latihan lanjutan untuk pekerjaan yang spesifik dan untuk promosi karir disediakan oleh perusahaan itu sendiri dan tidak diatur atau dilaksanakan melalui suatu program nasional, serta tidak juga ada intervensi dari pemerintah.

"Riset yang membandingkan tentang sumbangan pendidikan dan latihan terhadap produktivitas serta berbagai indikasi menunjukkan bahwa sistem latihan dan pendidikan magang (*on-the-job*) dari negara-negara tipe-B mempunyai kelebihan dalam menghasilkan tenaga kerja yang fleksibel dan terampil. Superioritas pendekatan tipe-B tergantung pada fakta bahwa keterampilan yang dikembangkannya lebih luas dan lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan yang akan datang. Riset menyimpulkan bahwa di dalam negara tipe-B, keterampilan yang di dapat lebih luas karena pendidikan dibagi-bagi antara sekolah dan perusahaan dan tidak terpisah-pisah secara fungsional. Keterampilan yang lebih luas memungkinkan pekerja untuk membuat sumbangan yang lebih besar pada produktivitas perusahaan dan juga mampu untuk menerima keterampilan baru.

Telah terbukti bahwa keterampilan yang luas dan fleksibilitas yang besar memang mempunyai pengaruh pada produksi industri. Salah satu sebab utama tentang timbulnya perbedaan kedua type ini (type A dan type B) adalah dalam kemampuan baca-tulis teknologi (Calhoun & Finch, 1976; 15). Keterampilan yang luas akan menambah produktivitas tidak hanya terlihat berpengaruh langsung pada penampilan tenaga kerja namun juga ada pengaruhnya pada organisasi tempat kerja. Perusahaan dengan pekerja yang telah dididik dalam jalur tipe-B biasanya mempunyai hirarki yang

lebih pendek, karena pekerja tersebut lebih mampu mengkoordinasikan aktifitasnya tanpa campur tangan pengawas dan tampaknya lebih mampu memperbaiki, memelihara dan mengganti peralatan kerja mereka tanpa harus memanggil teknisi.

Jepang dan Jerman adalah contoh utama negara tipe-B. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, di Jepang keberadaan perusahaan swasta yang besar dan kuat yang telah memikul tanggung jawab menyiapkan latihan tenaga kerja yang cukup merupakan kunci pokok dari sistem ini. Di Indonesia keadaan ini belum ada, karena sebagian besar perusahaan di Indonesia masih lemah dan kecil, sedangkan (dan mungkin alasan yang paling penting) orientasi terhadap teknologi masih kurang. Sebaliknya latihan di Jerman, dilaksanakan dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan swasta. Oleh karena itu Jerman merupakan model yang lebih sesuai bagi Indonesia, khususnya karena jangkauan yang lebih luas yang dapat dicapai dengan kerjasama antara industri dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan era industrialisasi yang akan datang, maka masih diperlukan peranan pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan pengembangan sistem latihan dan pendidikan kejuruan yang layak.

Dengan alasan seperti di atas itulah yakin bahwa para pendidik dan orang-orang yang terlibat di dalam dunia usaha dan industri di Indonesia hendaknya memberikan perhatian penuh pada negara-negara tipe-B, untuk mempelajari bagaimana negara-negara ini mengembangkan tenaga kerja yang terampil, fleksibel dan mampu baca-tulis teknologi.

Namun demikian kita tidak dapat menerapkan secara penuh keseluruhan sistem pendidikan dari luar begitu saja di Indonesia. Bukan itu tujuannya. tetapi bisa mendapat masukan penting, dan mengadaptasikannya pada sistem latihan dan pendidikan kita sendiri. Persamaaan dari keduanya adalah perlunya untuk mendukung industrialisasi dengan tenaga kerja yang fleksibel dan terampil.

Berbagai permasalahan dalam pendidikan kejuruan menurut Wardiman Djojonegoro (1992; 89-94), meliputi hal-hal sebagai berikut ; *a. Kualifikasi dan Sertifikasi*, merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem kualifikasi dan sertifikasi bagi pekerjaan atau profesi teknis serta keterampilan yang diperlukan. Ijazah atau sertifikat adalah dokumen yang diakui secara nasional, dan karenanya yang bersangkutan terjamin mendapat tingkat penghasilan yang layak serta dapat membuka jalan ke pendidikan yang lebih lanjut. *b. Kerjasama antara pemerintah dengan industri swasta dan negara*, Dalam mengenal sistem ganda di Indonesia, maka kerjasama antara pemerintah di satu fihak dan industri sektor swasta maupun negara difihak lain harus dibina. Karena industri sektor swasta dan negara adalah pemakai utama dari sistem pendidikan dan latihan kejuruan. Karena itu, industri-industri tersebut hendaknya berkepentingan (misalnya) dalam pengembangan sistem sertifikasi dan kualifikasi nasional. Peranan pemerintah disini hanya membina, industri itu sendiri mempunyai kepentingan untuk melaksanakan pendidikan kejuruan. *c. Peraturan pendidikan dan latihan kejuruan,* diperlukan adanya peraturan/perundangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan kejuruan. Sebagai contoh Jerman mengesahkan UU latihan kejuruan pada tahun 1969 yang memberikan kekuatan hukum bagi berbagai kamar/asosiasi. Pemerintah Korea mengesahkan UU kualifikasi Teknik Nasional pada tahun 1973 dalam usahanya untuk memperluas dan mengembangkan jumlah pekerja terampil dan teknisi berkualitas. *d. Asosiasi industri dan perdagangan,* hal ini diperlukan tidak saja untuk mempermudah negosiasi dan kerjasama mereka dengan pemerintah, namun juga akan menyediakan pendekatan seragam dalam memperbaiki kualitas dan keterampilan tenaga kerja di sektor industri di seluruh Indonesia.

e. Penyebaran Informasi, agar pasar tenaga kerja benar-benar berfungsi, maka informasi yang menyangkut persyaratan kualifikasi pekerja terampil, cara-cara untuk memperoleh kualifikasi tersebut, serta lowongan pekerjaan bagi pekerja terampil, harus

disebar luaskan sejauh mungkin. Kebutuhan sudah mendesak untuk melaksanakan peranan ini dengan semua prosedurnya. Dari pengalaman Jerman terlihat bahwa Pemerintah tidak terlalu terlibat di dalam perencanaannya. Pemerintah hanya akan berfungsi sebagai "Broker Informasi" dengan menghadirkan berbagai pihak secara bersama-sama (yaitu pekerja, pengusaha dan sekolah kejuruan). *f. Pendekatan Program Jangka Panjang untuk Memperbaiki Pendidikan dan latihan Kejuruan dengan Memperkenalkan Sistem Ganda*, meliputi permasalahan merubah persepsi masyarakat tentang status dan kedudukan pekerja terampil dan teknisi, maka perlu diadakan perumusan program dan pendekatan jangka panjang terperinci dalam rangka membangun tenaga kerja yang mampu baca-tulis teknologi.

g. Program Perintis untuk memulai Pelaksanaan, usaha untuk mengklasifikasikan semua pekerjaan dan posisi adalah usaha yang musykil. Jerman mempunyai 400 klasifikasi pekerjaan latihan dengan tiga belas bidang kejuruan, yang menjadi dasar untuk lebih dari 20.000 macam pekerjaan orang dewasa. Sistem sertifikasi nasional di Jepang mencakup lebih dari 700 bidang, baik teknis maupun non teknis. Sistem kualifikasi teknis dan non teknis di Jepang dimulai tahun 1959 dan sampai tahun 1978 telah menghasilkan sejumlah 700.000 teknisi dan pekerja terampil bersertifikat. Di Korea, Badan Pengujian dan Kualifikasi Teknis Korea dibentuk pada tahun 1976 untuk mencatat pengujian dan akreditasi kualifikasi teknis. Sistem Korea ini terpadu dan mempunyai dua kelompok kualifikasi : insinyur dan teknisi.

4. Potret Pendidikan Kejuruan di Indonesia.

Data yang ada pada Depdikbud sampai akhir Pelita ke-tiga tahun 1984. di Indonesia terdapat 274 SMTP Teknologi dan kejuruan lainnya dan 559 SMTA Teknologi dan Kejuruan. Lulusan SMTP kejuruan diharapkan mampu mencapai kualifikasi juru (*craftsman*) untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja setengah terlatih (*semi skilled*), sedangkan lulusan SMTA Teknologi dan Kejuruan lainnya diharapkan

mampu mencapai kualifikasi teknisi (*technician*) untuk tenaga tingkat menengah. Kebijakan yang diambil pada masa itu adanya pengurangan jumlah dengan pengintegrasian ke SMTP Umum secara bertahap, dan SMTA Teknologi dan Kejuruan dipertahankan dan bahkan dikembangkan secara besar-besaran.

Tabel 1-I
JUMLAH DAN JENIS SEKOLAH TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
1984 sampai 1990/1991

JENIS SEKOLAH (NEGERI)	1984 *)	1990/1991**)
1. ST	194	194
2. SKKP	80	74
3. STM	145	178
4. SPMA	22	--
5. SMEA	277	331
6. SKKA/SMTK	88	85
7. SPSA	10	--
8. SMSR/SMIK	17	--

keterangan :
*) Sumber dari Sukamto (1988; 18)
**) Sumber dari Rangkuman Statistik Persekolahan 1990/1991
-- Data tidak tersedia.

Beberapa pendapat umum yang menilai kesulitan mengembangkan pendidikan kejuruan pada jenjang persekolahan, antara lain ; disebabkan belum adanya kejelasan analisis kerja bagi tenaga kerja tingkat menengah, pelaksanaan pendidikan kejuruan relatif lebih mahal dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah nyaring bunyinya adalah adanya praduga bahwa pendidikan kejuruan produktivitasnya relatif lebih rendah dari pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah. Produktivitas disini dapat dilihat dari beberapa indikator,terutama dari mutu pendidikan dengan keempat dimensinya (Sanusi, 1990). Sedangkan isu lain yang terdengar dari kalangan dunia industri bahwa lulusan pendidikan formal kejuruan, **keterserapan** dan **pengembangannya** (daya suai terhadap perkembangan pekerjaan) lebih rendah dari lulusan pendidikan formal menengah umum.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia juga merupakan permasalahan umum yang ditemui pada negara-negara berkembang lainnya. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu 1) permasalahan yang menyangkut kepada orientasi pendidikan kejuruan dan 2) permasalahan yang menyangkut pelaksanaan teknis operasional pendidikan.

Permasalahan yang menyangkut kepada orientasi pendidikan kejuruan meliputi **sasaran perilaku dan materi pendidikan** yang akan diberikan. Sasaran perilaku dalam pendidikan kejuruan mengenai manusia yang bagaimana yang akan diharapkan, apakah sebagai tukang atau intelektual, tenaga kerja siap latih, siap tahu atau siap suai, dan banyak lagi sasaran yang diinginkan. Sedangkan materi pendidikan (bahan kajian dan pelajaran) berkaitan dengan kebijaksanaan pengembangan teknologi. Di negara berkembang pada umumnya hal ini masih menjadi perdebatan yang belum berakhir. Karena hal ini berkenaan dengan bahan-bahan yang akan diberikan sebagai bekal kepada manusia yang terlibat dalam pendidikan kejuruan tersebut.

Permasalahan kedua, menyangkut teknis operasional, dapat diperinci menjadi beberapa permasalahan yang lebih khusus seperti : manajemen dan pengorganisasian, kekurangan tenaga edukatif (jumlah dan kualitas), kesulitan dalam penyusunan bahan yang akan diberikan dan penyedian fasilitas atau lingkungan belajar serta permasalahan metodologi.

Masalah yang utama dalam pendidikan kejuruan pada saat sekarang ini adalah permasalahan sarana dan fasilitas pendidikan. Sulit dibayangkan apabila penyelenggaraan pendidikan kejuruan tidak dilengkapi dengan laboratorium atau tempat praktek yang memadai. Tempat praktek yang memadai adalah tempat praktek yang dapat menunjang sepenuhnya kegiatan-kegiatan pendidikan seperti praktikum. Hal ini pun terbentur pada permasalahan lain, seperti pengadaan tempat praktek yang memerlukan biaya mahal, juga disebabkan oleh kesulitan dalam penyusunan silabi, karena silabi

baik juga ditentukan oleh kemampuan laboratorium. Selain pengadaan tempat praktek juga dihadapkan kepada permasalahan pemeliharaan dan pengembangan. Pemeliharaan tempat praktek berkaitan dengan suku cadang peralatan praktek yang sulit diperoleh pada pasaran bebas seperti halnya dengan pengadaan peralatannya itu sendiri. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pengembangan peralatan tempat praktek akan selalu ketinggalan oleh dunia industri akibat pesatnya kemajuan teknologi.

5. Interaksi Komponen Pembelajaran di STM Bangunan

Keberadaaan komponen-komponen yang terdapat di sekolah (STM Bangunan), seperti manusia baik itu pimpinan sekolah, guru dan instruktur, dan tenaga administratif; program dan lingkungan pelaksanaan masih terlihat adanya kesenjangan satu dengan lainnya. Komponen-komponen ini sebagai sumber peningkatan kualitas atau M. Fakry Gaffar (1987; 45) menyebutnya dengan "faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses pengajaran terhadap anak didik", secara keseluruhan dan bersama memberikan layanan kepada peserta didik dalam upaya pemberian pengalaman belajar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan berbagai pihak (tujuan pendidikan).

Kesenjangan dari interaksi berbagai faktor itu dapat terlihat dari pengelolaan atau manajemen dengan manusia (guru), pengelolaan dengan sumberdaya pendidikan, pengelolaan dengan peserta didik. Guru dengan peserta didik, dan sumber daya dengan peserta didik. Pada gambar itu belum terlihat kaitan antara sumberdaya pendidikan dengan guru, karena guru ini pun mempunyai peran dan perlakuan yang sama dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Dari gambar itu terlihat pula bagaimana penting dan strategisnya peran dan kedudukan pengelolaan dalam proses pembelajaran di tingkat persekolahan, maupun pada tingkat proses belajar mengajar di ruang belajar.Gambaran keberadaan komponen tersaji dalam gambar di bawah ini :

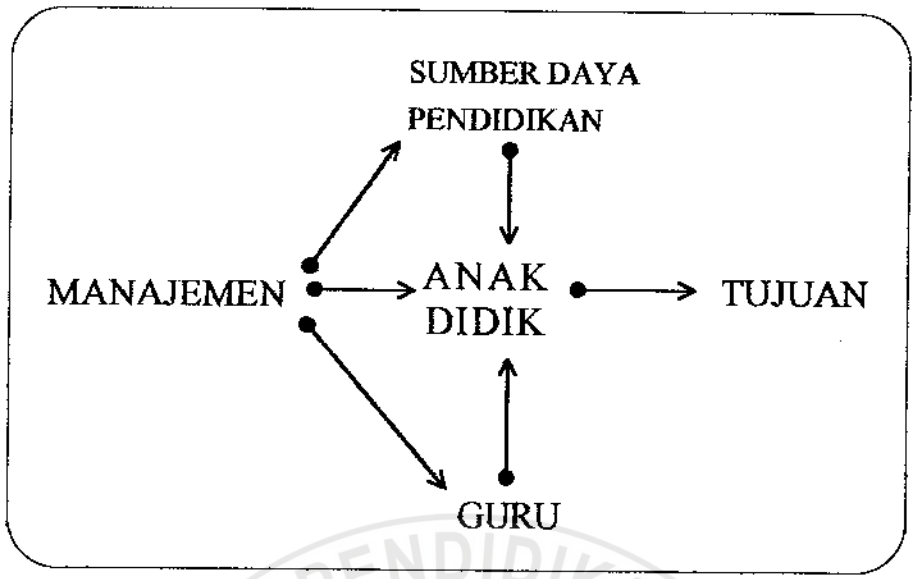

Gambar 2-I Keterkaitan keberadaan Komponen Pembelajaran di Sekolah
Sumber : Diadopsi dari M.Fakry Gaffar, 1987 ; 45.

Era informasi, pengaruh persaingan global, industrialisasi berdampak kepada penguasaan teknologi, peningkatan kesejahteraan, pergesaran gaya hidup, dan ketenaga kerjaan. Bertambahnya penduduk disertai dengan membaiknya kondisi ekonomi akan menambah permintaan pada pembangunan infra struktur, seperti; perumahan dan pemukiman, transportasi, komunikasi dan lain-lain. Penyiapan tenaga kerja tingkat menengah, baik tenaga kerja sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai penghasil produksi dan jasa merupakan hal yang sangat mendesak dalam menghadapi tantangan dalam era persaingan. Pendidikan kejuruan yang diselenggarakan oleh STMN 3 rumpun Bangunan dan STMN 5 memiliki beberapa rumpun satu diantaranya rumpun Bangunan, sebagai antisipasi dalam penyiapan tenaga kerja tingkat menengah ini pun dituntut untuk meningkatkan mutu pengelolaan pembelajarannya dengan lebih memacu kepada konsep kebijakan keterkaitan dan kepadanan (*link and match*) sekolah dengan dunia industri konstruksi khususnya, kebutuhan pembangunan pada umumnya.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif istilah identifikasi disebut sebagai "fokus penelitian"(Bogdan dan Biklen, 1982.; Goetz dan leCompte, 1984; Miles dan Huberman, 1984; Burgess, 1985; Lincoln dan Guba, 1985; William, 1988; Nasution, 1988; Subino, 1988 dan Moleong, 1989).

Gambaran pada uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa pendidikan kejuruan, yang diselenggarakan dalam sekolah kejuruan, khususnya STM Bangunan mempunyai keterkaitan yang sangat luas baik dengan unsur di luar sekolah yang terlihat dari berbagai kepentingan dengan lulusan sekolah, maupun keterkaitan antara komponen yang ada di lingkungan sekolah dalam upaya merespons menyiapkan lulusan yang sesuai dengan harapan yang membutuhkan.

Masalah dalam penelitian ini adalah "apakah perkembangan sektor industri konstruksi memberi peluang terhadap keterkaitan dan kepadanan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya Sekolah Teknologi Menengah (STM) Rumpun Bangunan ?".

Salah satu upaya untuk mengantisipasi adalah dengan melihat proses layanan pengelolalan program pembelajaran di Sekolah Teknologi Menengah (STM) Bangunan di Kotamadya Bandung, khususnya STM Negeri 3 dan STM Negeri 5.

Dari hasil studi pendahuluan yang berupa orientasi dan "overview" terhadap masalah di lokasi penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Nasution, 1988), maka masalah penelitian dapat dirumuskan menjadi dua fokus masalah penelitian, yaitu :

1. *Apakah sektor industri konstruksi yang ada dan berkembang di Indonesia khususnya Jawa Barat memberikan peluang kepada tenaga pelaksana pembangunan yang berbekal pendidikan kejuruan dari lulusan STM Bangunan ?*
2. *Sejauhmanakah pengelolaan program pendidikan di STM Bangunan memberikan jawaban terhadap tuntutan kesempatan kerja di dunia industri jasa konstruksi ?*

Pokok persoalan pertama menyangkut kepada hal-hal yang memberikan peluang untuk diisi oleh pendidikan kejuruan. Dengan kata lain bahwa pendidikan kejuruan tidak terlepas dari kegiatan pembangunan khususnya pembangunan industri konstruksi (seperti pembangunan perumahan, perkantoran dan pembangunan lainnya), karena pendidikan kejuruan dibutuhkan untuk mengisi pelaksana pembangunan melalui tenaga terampil yang dibutuhkannya.

Pokok persoalan kedua melihat kegiatan pelaksanaan pengelolaan pendidikan di lingkungan persekolahan sebagai jawaban atas persoalan yang pertama.

Berbagai fungsi yang disandang oleh persekolahan menyebabkan adanya ketertinggalan oleh perkembangan yang ada di luar. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada di luar persekolahan akan mempercepat keusangan program pembelajaran yang disediakan di persekolahan, yang pada gilirannya akan menimbulkan inefiensi.

Oleh karena itu penyelenggaran pendidikan kejuruan di persekolahan menuntut pengelolaan yang bisa melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan dengan hasil persekolahannya. Dalam upaya mengajak pelibatan unsur yang lain yang terkait dalam pengelolaan persekolahan pendidikan kejuruan, upaya keterbukaan dari fihak sekolah sangat diperlukan. Keterbukaan yang dimaksud adalah meliputi kemampuan akan biaya penyelenggaraan, kurikulum, fasilitas, baik kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Fokus masalah penelitian di atas dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. **Apakah sektor industri konstruksi yang ada dan berkembang di Jawa Barat memberikan peluang kepada tenaga pelaksana pembangunan yang berbekal pendidikan kejuruan dari lulusan STM Bangunan ?**
   a. Jenis industri konstruksi manakah yang banyak menyerap tenaga kerja tingkat menengah lulusan STM Bangunan ?

b. Pekerjaan atau *jobs* apakah yang dapat dilakukan oleh lulusan STM Bangunan pada dunia industri konstruksi di Jawa Barat ?

c. Lulusan STM Bangunan yang bagaimana yang diserap oleh masyarakat industri konstruksi di Jawa Barat ?

2. Sejauhmanakah pengelolaan program pendidikan di STM Bangunan memberikan jawaban terhadap tuntutan kesempatan kerja di dunia industri jasa konstruksi ?

a. Pertanyaan yang menyangkut isi program pembelajaran di sekolah.

1) Apakah isi program pendidikan (kurikulum) di STM Bangunan terkait dengan kebutuhan dunia industri konstruksi di Jawa Barat ?

2) Apakah tujuan kurikulum STM Bangunan mengarah kepada kebutuhan peserta didik ?

3) Apakah tujuan kurikulum STM Bangunan mengarah kepada kebutuhan pekerjaan di lapangan ?

4) Kebijakan-kebijakan apakah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk menterjemahkan kurikulum ?

5) Profil lulusan yang bagaimana dipersiapkan oleh STM Bangunan untuk dapat memenuhi tuntutan dunia industri konstruksi di Jawa Barat ?

b. Pertanyaan yang meliputi proses pembelajaran.

1) Pertanyaan yang menyangkut *PBM*.

a) Apakah tujuan kurikulum dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh para guru di kelas ?

b) Apakah pelaksanaan program pembelajaran di sekolah memenuhi kebutuhan belajar murid (*individual needs*) dan kebutuhan industri konstruksi (*social needs*) ?

c) Sejauhmanakah panduan pelaksanaan pembelajaran yang ada, berperan dalam peningkatan mutu hasil belajar ?

d) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembelajaran teori dengan pembelajaran praktikum ?

e) Sejauhmanakah fleksibilitas program pembelajaran di STM Bangunan (STMN 3 dan STMN 5 Bandung) ?

f) Bagaimanakah mekanisme penilaian program pembelajaran di sekolah ?

2) Pertanyaan yang menyangkut komponen *Manusia di sekolah.*

a) Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang perubahan yang terjadi di industri konstruksi ?

b) Bagaimanakah persepsi kepala sekolah tentang perkembang- an ketenaga kerjaan tingkat menengah di masyarakat ?

c) Bagaimana persepsi kepala sekolah tentang lulusan yang kelak akan bekerja di dunia industri konstruksi ?

d) Bagaimanakah kesiapan pimpinan sekolah dalam melaksana- kan program pembelajaran di sekolah ?

e) Kemampuan apa yang diperlukan kepala sekolah dalam memenuhi tuntutan program pembelajaran di STM Bangunan ?

f) Bagaimanakah persepsi para guru tentang peserta didik yang dipersiapkan bekerja di industri konstruksi ?

g) Bagaimanakah kesiapan para guru dalam memenuhi tuntutan program pembelajaran di sekolah ?

h) Kemampuan apa yang diperlukan para guru dalam memenuhi tuntutan program pembelajaran di STM Bangunan ?

i) Apakah etos kerja para guru STM Bangunan berperan dalam meningkatkan mutu hasil belajar ?

3) Pertanyaan yang menyangkut *Sarana dan prasarana*

a) Bagaimana kesesuaian sarana yang ada di sekolah dengan tuntutan program ?

b) Bagaimana kesesuaian sarana yang ada di sekolah dengan tuntutan pekerjaan dari dunia industri konstruksi ?

c) Bagaimana kesesuaian pembiayaan pendidikan dengan tuntutan program pembelajaran di sekolah ?

4) Pertanyaan yang menyangkut *Pelaksanaan Tugas (Manajemen)*

a) Apakah tindakan kepala sekolah dalam mengupayakan keterkaitan program pembelajaran dengan tuntutan pasaran kerja ?

b) Bagaimanakah kepala sekolah berperan sebagai administrator, dalam mengelola program pembelajaran di STM Bangunan ?

c) Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah dalam upaya memperbaiki mutu hasil belajar ?

d) Bagaimana upaya kepala sekolah untuk bertugas tidak terjebak dalam rutinitas tetapi sebagai pengambil keputusan dalam rangka fleksibilitas dalam mengelola organisasi sistem sosial ?

e) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam kerja sama dengan dunia industri konstruksi sebagai mitra dalam peningkatan mutu hasil belajar ?

f) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam membina hubungan kerjasama dengan Pemda, Deperin, Depnaker, DPU dalam pendayagunaan sarana belajar ?

g) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam mendayagunakan peralatan/sarana belajar yang ada di luar sekolah ?.

h) Bagaimanakah upaya sekolah dalam membantu pembiayaan pendidikan ?

i) Bagaimanakah sifat hubungan Kabid dengan kepala sekolah dalam kaitan pengelolaan program pembelajaran di sekolah ?

j) Bagaimanakah sifat hubungan kepala sekolah dengan para guru ?

k) Bagaimanakah sifat hubungan kepala sekolah dengan instansi lain di luar sekolah dalam kaitan pengelolaan program pembelajaran ?

l) Bagaimanakah respons kepala sekolah terhadap kreativ- itas guru-guru dalam meningkatkan mutu pengelolaan program pembelajaran ?

m) Bagaimanakah tindakan para guru dalam mengupayakan keterkaitan program pembelajaran dengan tuntutan pasaran kerja ?

n) Bagaimana proses penyesuaian kurikulum pada tingkat sekolah di STM Bangunan ?

c. *Pertanyaan menyangkut partispasi instansi lain yang terkait dengan pengelolaan program pembelajaran Sekolah Teknologi Menengah (STM) Bangunan khususnya STM N III dan STM N V.*

1) Bagaimanakah peran dan sumbangan yang diberikan oleh instansi pemerintah, seperti Deperin, Deperdag dan Depnaker serta DPU kepada *pembuatan* program pembelajaran di STM Bangunan ?

2) Sejauhmanakah partisipasi masyarakat industri konstruksi seperti Gapensi, Kadin dan Inkindo di Jawa Barat dalam *pembuatan* program pembelajaran di STM Bangunan ?

3) Sejauhmanakah partisipasi instansi pemerintah seperti, depnaker dengan BLIB-nya dalam membantu *pelaksanaan* pembelajaran di sekolah ?

4) Apakah peran Deperin, Deperdag, Depnaker dan DPU baik kanwil maupun Dinasnya, memberikan peluang dalam *pelaksanaan* pembelajaran pada masyarakat industri konstruksi di Jawa Barat ?

5) Apakah partisipasi Gapensi, Inkindo dan Kadin dalam memberikan bantuan pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun di industri konstruksi ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang terdapat dalam fokus penelitian yaitu meningkatkan keterkaitan dan kepadanan STM Bangunan, khususnya melalui peningkatan mutu pengelolaan program pembelajaran di STM Bangunan.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari sektor industri yang ada dan berkembang di Indonesia khususnya Jawa Barat memberikan peluang kepada tenaga pelaksana pembangunan yang berbekal pendidikan kejuruan dari lulusan STM Bangunan.
2. Mempelajari dan mengetahui pengelolaan program pendidikan di STM Bangunan dalam memberikan jawaban terhadap tuntutan kesempatan kerja di dunia industri jasa konstruksi.
   a. Mengetahui komponen isi program pembelajaran di sekolah.
   b. Mengetahui Proses pembelajaran di Sekolah, seperti ;
      1) Kegiatan PBM di sekolah
      2) Mutu Sumber Daya Manusia di sekolah
      3) Sarana dan prasarana di sekolah
      4) Mutu layanan manajemen
   c. Mengetahui partispasi instansi lainnya yang terkait dalam memberikan layanan terhadap peningkatan mutu pengelolaan program pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya STM.

Selanjutnya dari hasil penelitian ini akan mengungkapkan makna-makna baru, dilanjutkan dengan merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di STM dengan meningkatkan mutu layanan pengelolaan yang diberikan oleh para pelaksananya.

D. Manfaat Penelitian

Di awal sudah dikemukakan bahwa penelitian ini diharapkan dapat mengung-kapkan makna-makna baru yang dapat diangkat untuk selanjutnya dirumuskan dalam upaya pengembangan atau penyempurnaan sistem layanan pengelolaan bagi para pelaksana di STM. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk :

1. Manfaat Ilmiah.

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengayaan dan pengembangan teori pengelolaan. Penafsiran tentang perkembangan pola pembangunan, prioritas sektor pembangunan, Kebijakan sektor pembangunan industri, penanaman investasi, kegiatan perekonomian dan sudah barang tentu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan. Pendidikan merupakan sistem yang terbuka, selalu berpengaruh terhadap supra sistem dan dipengaruhi oleh sistem-sistem yang lain. Penafsiran akan hal-hal tersebut di atas sangat berdampak dalam pengelolaan pendidikan baik, dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan program pendidikan kejuruan.

Pemahaman guru, kepala sekolah, pengawas dan para pengelola pada tingkat kanwil, pengelola pada instansi terkait (Pemda, Dep. Perindustrian; Dep. Tenaga Kerja, BKPMD) tentang hal-hal yang dijadikan dasar untuk memahami perilaku kepemimpinan pengajaran yang ditampilkan kiranya dapat diangkat sebagai konsep-konsep yang solid untuk melandasi praktek pengelolaan STM yang dapat diandalkan.

Minimalnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengung-kapkan validitas-validitas teori yang melandasi praktek pengelolaan yang telah dikembangkan dikaitkan dengan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini.

Manfaat yang lainnya adalah dari segi metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan naturalistik, telah memberikan pengalaman

yang sangat berharga, terutama dalam hal keterlibatan peneliti sebagai pelaku utama yang memberikan internalisasi pemahaman, daripada hanya membaca teori atau pengalaman orang lain. Semoga penelitian ini berguna untuk siapa yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan naturalistik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk meningkatkan dan menyempurnakan praktek layanan pengelolaan program pembelajaran di STM. Meningkatkan mutu layanan pengelolaan program pembelajaran pada giliran akan bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa STM.

Praktek layanan pengelolaan program pendidikan tidak mutlak menjadi tugas kepala kanwil, kepala kandep, kepala sekolah dan pengawas tetapi juga merupakan tugas guru di kelas. Karena Keberhasilan suatu pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan dalam suatu proses belajar mengajar. Terutama pengelolaan program pembelajaran sangat diperlukan dalam upaya mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tuntutan persyaratan kerja yang semakin bertambah.

Dari hasil penelitian diungkapkan pula bagaimana kewenangan yang diperoleh oleh para guru dalam melakukan praktek pengelolaan program pembelajaran, sudah barang tentu ini sangat bermanfaat untuk memberikan keleluasaan bagi para pelaksana kurikulum pada garda terdepan untuk melibatkan program pembelajaran lain di luar persekolahan dalam upaya peningkatan efisiensi pelaksanaan belajar mengajar di sekolah.

E. Paradigma Penelitian; Kerangka Pemikiran, Premis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik kualitatif, menurut Lincoln dan Guba (1985;223) untuk dapat melihat dan memahami fokus penelitian secara lebih tajam diperlukan suatu paradigma penelitian, yaitu "statement of theoretical perspective

that will guide the inquiry". Sementara itu, untuk maksud yang sama Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman (1984;28) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif perlu adanya suatu "conceptual framework". Selanjutnya Milles dan Huberman mengatakan bahwa "conceptual framework explains, either graphically or in narrartive form, the main dimentions to be studied". Sedangkan Carter V. Good (1973;407) menyatakan bahwa paradigma merupakan " a representation, a model of a theory, an idea or a principle". Selain itu, menurut Stuart A. Schlegel (1986;16) bahwa dalam suatu penelitian yang mendasar diperlukan paradigma, karena semua analisis harus berdasarkan berbagai ide yang telah ditetapkan sebelumnya.

Thomas S. Khun (173;27-28) menyatakan bahwa "a paradigm is prerequisite to the discovery of laws", selanjutnya ia mengemukakan alasan-alasan mengapa paradigma penting sekali dalam suatu penelitian.

"...resolving some of its residual ambiguities and permitting the solution of problems to which it had previously only drawn attention; to define the problem and to guarantee the exixtence of a stable solutions".

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa paradigma penelitian merupakan cara berfikir yang diambil peneliti dalam melihat atau memahami realitas objek yang ditelitinya. Oleh karena itu paradigma merupakan suatu "conceptual goggles", yaitu cara berfikir masyarakat ilmiah untuk memahami realitas objek yang ditelitinya. Paradigma digunakan untuk menunjukkan konsepsi dasar seseorang mengenai sesuatu aspek realitas tertentu (Ziaudin Sardar, 1986;339). Dengan kata lain aspek realitas atau masalah yang diteliti sangat ditentukan oleh konsepsi dasar yang dipilih, yang pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran dan premis-premis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh peneliti. Mengenai paradigma penelitian, yang menggambarkan kerangka pemikiran dan premis penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3-I pada halaman berikut.

Pada gambar 3-I terlihat bahwa, hubungan sekolah dengan masyarakat industri melalui peran lulusan. Lulusan ini merupakan hasil layanan dari pengelolaan program pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu menata interaksi berbagai komponen seperti, manusia dengan segala ide, motivasi, dan kemampuan serta keberaniannya; program; dan lingkungan pelaksanaan tugas, yang bermuara kepada layanan pembelajaran peserta didik, yang pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kepadanan dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri serta mempunyai keterkaitan program sekolah dengan pasar kerja.

Penelitian ini mempersoalkan pengelolaan program pembelajaran di STM . Pengelolaan program pembelajaran yang dimaksud adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan perangkatnya untuk mengoptimalkan program pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Berbagai pihak berpengharapan kepada STM Bangunan khususnya kepada para lulusannya, baik itu Orang tua, peserta didiknya sendiri, Pemerintah yang meliputi Depdikbud sebagai penyelenggara dan pembina serta instansi lain yang memberikan arahan kepada pembangunan industri seperti Pemda, Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga kerja, dan Masyarakat industri sebagai pengguna lulusan STM Bangunan itu sendiri. Harapan itu terlihat masih merupakan suatu kesenjangan dengan persepsi pengelolaan pembelajaran di STM Bangunan, kesenjangan itu menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Demikian pula halnya dengan berbagai perangkat yang ada di lingkungan sekolah, baik itu manusia, program dan hubungan keorganisasian (pelaksanaan tugas), yang bermuara seluruhnya kepada layanan untuk menghasilkan pengalaman belajar peserta didik dan akhirnya memberikan bekal untuk para lulusan STM Bangunan. Keterkaitan berbagai perangkat itu pun masih terlihat adanya kesenjangan satu sama

lainnya. Maka melalui pengelolaan pembelajaran di sekolah dengan berbagai inovasinya diupayakan untuk mengatasi kesenjangan ini dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu hasil belajar yang terlihat dari semakin kecilnya berbagai kesenjangan baik harapan dari luar sekolah maupun berbagai perangkat layanan di dalam sekolah.

STM Bangunan sebagai suatu sekolah yang melaksanakan jenis pendidikan kejuruan pada jenjang menengah selalu dihadapkan kepada permasalahan biaya penyelenggaraan belajar mengajar yang mahal. Dengan dikelolanya program pembelajaran yang tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dapat mengelola program pembelajaran yang ada di luar lingkungan persekolahan, diharapkan akan mengurangi beban pembiayaan pendidikan dan sekaligus meningkatkan mutu lulusan yang dilihat dari kesesuaian pengetahuan dan keterampilan yang di berikan di sekolah dengan kebutuhan atau persyaratan keterampilan yang terdapat di dunia kerja dan khususnya dunia industri. Tema sentral masalah penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan program pembelajaran hanya dilakukan untuk yang ada di lingkungan persekolahan saja. Selama ini program pembelajaran yang ada di sekolah selalu dalam keadaan ketinggalan dan serba terbatas sedangkan pengetahuan peralatan kerja (implementasi dari iptek) yang berkembang di masyarakat selalu mengalami perubahan dengan laju yang lebih cepat dari perkiraan sekolah. Padahal jenis pendidikan kejuruan yang menjadi garapan STM Bangunan selalu dituntut masalah kesesuaian/kepadanan (*match*), sehingga dalam menilai mutu hasil belajar dari STM Bangunan lebih cenderung dilihat dari kesesuaian/kepadanan antara lulusan dan persyaratan pekerjaan yang tersedia di masyarakat.

Esensi pemikiran yang terlintas dalam rumusan tema sentral di atas adalah "keterkaitan dan kepadanan di STM Bangunan adalah dengan meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan mutu pengelolaan program pembelajaran".

Pengelolaan program pembelajaran dilaksanakan dengan berintikan suatu proses pengambilan keputusan yang mencakup cara dan kewenangan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Keputusan yang dihasilkan baik pada kewenangan kepala sekolah maupun guru, apakah dapat membuat suatu peningkatan dalam peningkatan mutu hasil belajar. Dalam konteks ini peranan kepemimpinan utamanya kepemimpinan kepala sekolah dan guru merupakan suatu yang strategis untuk meningkatkan mutu hasil belajar STM Bangunan melalui pengelolaan program pembelajaran.

Untuk dapat memahami persoalan di atas, dalam penelitian ini dirumuskan sejumlah premis yang dijadikan dasar bagi peneliti dalam melakukan proses inquiri.

Premis-premis yang dikemukakan merupakan evidensi ilmiah yang diketahui dan relevan dengan penelitian ini. Premis-premis itu adalah :

Premis 1 : Orang tua, Masyarakat dan Sekolah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Premis 2 : Pendidikan kejuruan merupakan suatu jenis pendidikan yang langsung berkaitan dengan prodiktivitas manusia yang seraca langsung berkaitan dengan pengisian lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat.

Premis 3 : Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, di era informasi dan penuh persaingan ini, Sekolah Menengah Kejuruan berperan penting.

Premis 4 : Kepadanan sekolah kejuruan dengan dunia industri dapat dilihat dari mutu lulusannya.

Premis 5 : Peningkatan mutu hasil belajar dari persekolahan akan efektif dan efisien bila dimulai dari peningkatan mutu pengelolaan.

Premis 6 : Pengelolaan pendidikan di persekolahan yang dipandang sebagai sistem sosial pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan.

Premis 7 : Pengelolaan pendidikan dalam upaya meningkatkan produktivitas sekolah sangat tergantung kepada efektivitas kepemimpinan suatu organisasi.

Premis 8 : Seluruh aspek layanan yang ada di sekolah sebagai garapan pengelolaan bermuara kepada pelayanan ke peserta didik.

Premis 9 : Komponen utama dalam persekolahan sebagai satuan pendidikan terdiri atas, manusia, program, sarana dan pelaksanaan tugas.

Premis 10 : Kesenjangan antar komponen pembelajaran di sekolah merupakan kendala dalam mengoptimalkan layanan mutu pengelolalaan kepada peserta didik.

Premis 11 : Kepala sekolah sebagai pengelola pada tingkat satuan pendidikan di SMK merupakan komponen penting dalam mengatasi kesenjangan dari berbagai komponen pembelajaran.

Premis 12 : Guru berperan sebagai pengelola pembelajaran pada tingkat pengelolaan proses belajar mengajar

Premis-premis di atas merupakan pedoman dalam melaksanakan proses inquiri untuk mempelajari fokus penelitian. Dengan demikian premis-premis tersebut merupakan alat atau pedoman bertanya dan observasi serta telaahan dokumentasi dalam proses pengumpulan data.

F. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah sebagian dari wilayah kajian administrasi pendidikan. Penelitian dilakukan pada pengelolaan tingkat persekolahan (M2) dan tingkat proses belajar mengajar (M3) dengan latar belakang di dasarkan pada pengelolaan tingkat makro (M1).

Kajian pengelolaan pembelajaran meliputi pengelolaan manusia; seperti kepala sekolah, pengawas, guru dan peserta didik, program pembelajaran, dan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Pengelolaan dalam penelitian ini lebih banyak pada fungsi

pelaksanaan program pembelajaran. Pelaksanaan yang dimaksud meliputi kepemimpinan, pengorganisasian, pengkoordinasiaan, pelaporan dan penstafan.

Wilayah kajian penelitian ini, secara garis besar tersaji dalam gambar di bawah ini :

PENGAMBIL	KEPUTUSAN	M1	NOMOTETIS									PRODUKTIVITAS
				Perencanaan			Pelaksanaan			Pembinaan		
				M	Pr	F	M	Pr	F	M	Pr	F
		M2	PERENCANAAN									
			PELAKSANAAN				■	■	■			
			PEMBINAAN									
		M3	IDIOGRAFIS									

GAMBAR 4-I : Wilayah Kajian Administrasi Pendidikan
Sumber : Diadopsi dari Engkoswara, 1984.

Keterangan :

M1 : Makro	M : Sumber daya manusia
M2 : Meso	Pr : Program Pembelajarn
M3 : Mikro	F : Fasiltas (Sarana/ dan prasarana)

■ = Wilayah kajian penelitian.